PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 31 Mei 2017 Halaman: 13

Masih Ada Catatan Keuangan

● Pemkot Yogya Sabet Opini WTP

YOGYA, TRIBUN -Selama delapan kali Pemerintah Kota Yogyakarta terus menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun meraih WTP, namun ada sejumlah catatan yang masih harus dituntaskan dan akan diklarifikasi oleh panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Rabu (30/5) hari ini.

Perlu diketahui Pemkot meraih opini WTP dari BPK sejak tahun 2010 lalu. Meski ini adalah keberhasilan Pemkot Yogya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Namun, masih ada catatan yang perlu dibenahi oleh Pemkot setempat.

"Ini bentuk keberhasilan Pemkot dalam menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat. Ini juga menjadi pelecut bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Yogya," ujar Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Selasa (30/5).

Menurutnya, hasil opini WTP

● ke halaman 14

Masih Ada Catatan Keuangan

● Sambungan Hal 13

yang diperoleh delapan kali berturut-turut tersebut akan dijadikan sebagai standar penyampaian laporan keuangan dari Pemkot Yogya di masa yang akan datang. Dia juga meminta agar pengelolaan keuangan daerah harus disusun dengan hati-hati agar semua kegiatan terdokumen dengan rapi.

"WTP merupakan bagian perwujudan *e-goverment* yang tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran tertib secara administrasi," ujarnya..

Haryadi juga meminta seluruh jajaran Pemkot Yogya untuk tidak berpuas diri dengan prestasi yang diperoleh. Ia berharap penghargaan yang diraih menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja agar bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi.

Capaian opini WTP ini, kata dia, juga hasil kinerja dari semua pihak, baik SKPD maupun masyarakat Kota Yogya terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Bahkan, sebelum memberikan opini WTP ini, BPK melihat dari beberapa kriteria penilaian mulai dari standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peranturan perundangundangan dan satuan pengawasan internal.

Kepala BPK RI perwakilan DIY, Yusnadewi menjelaskan jika opini WTP yang diraih oleh Kabupaten/Kota se DIY sudah diseleksi secara ketat. Dalam hal ini, BPK memiliki standarnya sendiri yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Untuk memberikan opini WTP juga harus disertai dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Diantaranya, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan indikator kesejahteraan masyarakat dalam mengimplementasi keuangan daerahnya masing-masing.

"Pemberian opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)" ujarnya.

Jangan puas

Ketua Panitia Khusus LHP BPK, Nasrul Khoiri menyebut Pemkot untuk tidak berpuas diri dan tenggelam dalam capaian opini WTP dari BPK. Pasalnya, BPK memberikan LHP-nya terkait dengan pendapatan tahun anggaran 2016 yang masih harus diklarifikasi.

"Capaian WTP yang berturut-turut itu menjadi cambuk untuk tidak berpuas diri. Ada banyak hal yang belum optimal dan ternyata tidak terekam dalam laporan tahunan BPK," ujarnya, Selasa (30/5) sore.

Sementara, temuan dalam LHP BPK tahun 2016 ini, kata dia menjadi momentum bagi DPRD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan lebih detail atas hal-hal yang disampaikan eksekutif. Sementara, bagi masyarakat menjadi momentum untuk terus memberikan kritik dan masukan.

"Sekaligus untuk taat aturan. Khususnya, bagi wajib pajak dan wajib retribusi," jelasnya.

Pihaknya pun tetap akan melakukan klarifikasi pada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (31/5) hari ini. Klarifikasi ini dilakukan atas beberapa temuan yang masuk ke dalam LHP BPK dengan total potensi temuan kurang bayar atau tidak tertagih Rp3,558 miliar.

Menurutnya, klarifikasi ini ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan penagihan pada beberapa item yang kurang bayar atau pajak tertunggak. Pasalnya, pihaknya telah menerima informasi adanya proses administrasi penagihan pada wajib pajak. Namun, pihaknya belum mengetahui perkembangan dari penagihan ini karena belum mendapatkan laporan. **(ais)**

2. ☐ Positif ☐ Segera ☐ Untuk Diketahui
3.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005